

ANALISIS PERBEDAAN ANGGARAN, REALISASI DAN DAYA SERAP BELANJA DAERAH (PROVINSI SUMATERA UTARA DAN JAWA TENGAH)

Juliati¹⁾, Trisninik Ratih Wulandari²⁾, Arum Kusumaningdyah Adiati³⁾

¹Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: juliati.qodrian@gmail.com

Abstract

This study is to determine whether there are differences in the budget, realization and absorption of regional expenditures in districts in North Sumatra and Central Java provinces. The data used in this study are 31 regencies in North Sumatra Province and 29 regencies/cities in Central Java Province. This study uses the Mann Whitney Non-Parametric Test to test whether there are differences in budget, realization and absorption in districts/cities in the two provinces. The results of this study indicate that the first hypothesis is accepted, the second hypothesis is accepted for operational expenditure realization, capital expenditure realization and regional expenditure realization, while the third hypothesis is rejected.

Keywords: *absorption, regional budget, operational expenditure, capital expenditure, unexpected expenditure.*

1. PENDAHULUAN

Daya serap anggaran belanja menjadi hal yang penting dalam suatu pengelolaan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi akan bisa dimanfaatkan dengan baik jika pemerintah daerah memiliki program-program yang bisa dirasakan oleh masyarakat umum yang ada di wilayahnya. Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah akan tercermin dalam belanja daerah yang terdapat dalam laporan keuangan daerah yang diterbitkan setiap tahun dan akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah maka setiap daerah memiliki keleluasaan dalam mengatur daerahnya sehingga diharapkan kinerja pemerintah daerah akan semakin lebih baik. Anggaran belanja daerah akan mencerminkan kinerja pemerintah daerah karena dengan belanja tersebut, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan PAD yang sudah didapatkan dari masyarakat melalui pembayaran pajak, retribusi atau bagi hasil dari badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah (BUMD).

Kinerja pemerintah daerah bisa dilihat dengan terserapnya belanja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Belanja pemerintah daerah bisa berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan anggaran yang rendah bisa mengakibatkan perlambatan pada pertumbuhan

ekonomi. Pengetahuan peraturan, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa (Juliani and Sholihin 2014). Daya serap yang tinggi menunjukkan bahwa anggaran belanja daerah dapat terserap menjadi pengeluaran yang bisa memberikan dampak yang baik bagi daerahnya dan tidak mengakibatkan hilangnya manfaat belanja sehingga pemerintah pusat selalu mendorong pemerintah daerah agar dapat merealisasikan penyerapan anggaran sampai dengan 100 (seratus) persen.

Pencapaian daya serap anggaran belanja daerah hingga seratus persen bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Setiap akhir tahun hampir seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia selalu melaporkan adanya sisa anggaran yang tidak terserap. Daya serap yang rendah akan tercermin dari sisa anggaran yang besar. Penyerapan anggaran dipengaruhi oleh sisa anggaran tahun lalu, pendapatan asli daerah dan perubahan anggaran (Rambe 2017). Para ekonom memandang rendahnya tingkat serapan anggaran sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi yang dapat menghambat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di daerah, penyerapan anggaran yang tinggi tanpa adanya output serta outcome yang optimal akan menunjukkan kinerja yang kurang baik (BPKP 2011)

Penelitian mengenai daya serap antara lain; penelitian mengenai daya serap yang rendah di Kabupaten Tuban tahun 2015 yang hanya 54,64% sampai dengan triwulan III dan terjadi penumpukan daya serap di triwulan IV (Anfujatin 2016), penelitian di Kabupaten Karawang pada kurun waktu 2010 – 2014 juga menyebutkan bahwa penumpukan penyerapan anggaran juga terjadi di triwulan IV (Megawati 2017). Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2012 -2015 menyebutkan rata-rata penyerapan anggaran sampai akhir tahun masih di bawah 95% (Ruhmaini, Abdullah, and Darwanis 2019).

Permasalahan penyerapan anggaran tidak hanya terjadi pada pemerintah daerah tetapi bisa juga terjadi pada kementerian/lembaga negara sehingga bisa memiliki factor penyebab yang sama. Faktor yang bisa menyebabkan permasalahan penyerapan anggaran antara lain: internal kementerian/lembaga, proses pengadaan barang dan jasa, dokumen pelaksanaan anggaran dan proses revisi, permasalahan lainnya seperti adanya peningkatan alokasi belanja kementerian/lembaga pada saat terjadi perubahan APBN sebagaimana tertuang dalam APBN-P (Siswanto et al. 2011)

Daya serap yang tinggi menjadi acuan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatannya sehingga semakin tinggi daya serap maka pendapatan lainnya yang berasal dari pemerintah pusat akan bisa semakin besar. Daerah-daerah di Indonesia seperti Pulau Jawa yang memiliki luas wilayah yang sempit tapi jumlah penduduk yang besar sehingga pendapatan daerah juga menjadi besar maka belanja yang dikeluarkan juga besar akan tetapi daerah di luar Pulau Jawa yang memiliki luas wilayah yang besar, jumlah penduduk yang tidak begitu banyak dan pendapatannya pun tidak begitu besar sehingga belanja yang dikeluarkan juga tidak sebesar propinsi yang ada di Jawa.

Penelitian akan mengkaji potret anggaran belanja daerah propinsi di Indonesia beserta daya serapnya. Apakah anggaran belanja daerah di provinsi yang berada di Pulau Jawa lebih besar dari propinsi yang berada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian serta pulau kecil lainnya? Apakah anggaran belanja daerah yang besar di suatu propinsi juga menunjukkan adanya daya serap yang tinggi? Bagaimana perbandingan anggaran belanja daerah propinsi serta daya serapnya pulau-pulau di Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) merupakan rencana anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah dan akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rencana tersebut harus mencerminkan berapa jumlah

pendapatan dan belanja yang ada pada satu tahun anggaran. Penyusunan rencana tersebut sering disebut disebut dengan penganggaran yang mana sangat berperan penting dalam perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas publik (Mardiasmo 2002).

Dalam penyusunan APBD tentu akan memperhatikan kapan suatu belanja akan dikeluarkan dan harus memiliki rencana pengeluaran yang baik agar belanja tersebut tidak terserap di akhir tahun. Penyerapan anggaran dapat menjadi suatu indikator akan keberhasilan suatu kebijakan yang telah dilakukan sehingga penyerapan anggaran yang maksimal harus diikuti dengan suatu perencanaan yang baik (Halim 2014).

Pulau Jawa sangat terkenal dengan pembangunannya dibanding pulau-pulau yang lain di Indonesia. Otonomi daerah akan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan pendapatan yang ada di daerahnya dalam rangka memajukan daerah. Perbedaan orientasi serta program bisa mengakibatkan belanja yang berbeda di tiap daerah. Oleh karena itu, bisa mengakibatkan anggaran, realisasi daya serap yang berbeda di masing-masing belanja yang terdapat dalam laporan keuangan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1: Terdapat perbedaan anggaran belanja operasional, anggaran belanja modal, anggaran belanja tak terduga dan anggaran belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2017.

H2: Terdapat perbedaan realisasi belanja operasional, realisasi belanja modal, realisasi belanja tak terduga dan realisasi belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2017.

H3: Terdapat perbedaan daya serap belanja operasional, daya serap belanja modal, daya serap belanja tak terduga dan daya serap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2017.

2. METODE PENELITIAN

Sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Adapun beberapa syarat yang ditentukan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Terdapat di Pulau Jawa atau Sumatera

2. Memiliki jumlah kabupaten yang hampir sama
3. Memiliki jumlah kabupaten/kota melebihi 30
4. Kabupaten/kota memiliki laporan keuangan tahun 2016-2017 yang telah diaudit
5. Nilai anggaran/realisasi belanja daerah lebih besar/sama dengan 1

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Anggaran Belanja Operasional yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran
2. Anggaran Belanja Modal yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran
3. Anggaran Belanja Tak Terduga yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran
4. Anggaran Belanja Daerah yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran
5. Realisasi Belanja Operasional yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran
6. Realisasi Belanja Modal yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran
7. Realisasi Belanja Tak Terduga yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran
8. Realisasi Belanja Daerah yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran
9. Daya serap belanja operasional (DSBO)
Daya serap belanja operasional dirumuskan sebagai berikut.
$$DSBO = \frac{\text{realisasi belanja operasional}}{\text{anggaran belanja operasional}}$$
10. Daya serap belanja modal (DSBM)
Daya serap belanja modal dirumuskan sebagai berikut.
$$DSBM = \frac{\text{realisasi belanja modal}}{\text{anggaran belanja modal}}$$
11. Daya serap belanja tak terduga (DSBTT)
Daya serap belanja tak terduga dirumuskan sebagai berikut.
$$DSBTT = \frac{\text{realisasi belanja tak terduga}}{\text{anggaran belanja tak terduga}}$$
12. Daya serap belanja daerah (DSBD)
Daya serap belanja daerah dirumuskan sebagai berikut.
$$DSBD = \frac{\text{realisasi belanja daerah}}{\text{anggaran belanja daerah}}$$

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Statistik deskriptif

Analisa ini digunakan untuk mengetahui sebaran statistik hasil kuesioner yang telah diperoleh seperti mean, median dan modus.

2. Analisa kuantitatif
Analisa ini dengan menggunakan uji non parametrik yaitu Mann Whitney.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan menggunakan kabupaten/kota yang mewakili pulau Sumatera dan kabupaten/kota mewakili pulau Jawa. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Tengah. Tabel 1. Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah

Tabel 1
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah

Sumatera Utara	Jawa Tengah
1. Kab Asahan	1. Kab Banjarnegara
2. Kab Batu Bara	2. Kab Banyumas
3. Kab Dairi	3. Kab Batang
4. Kab Deli Serdang	4. Kab Blora
5. Kab Humbang Hasunduta	5. Kab Boyolali
6. Kab Karo	6. Kab Brebes
7. Kab Labuhanbatu	7. Kab Cilacap
8. Kab Labuhanbatu Selatan	8. Kab Demak
9. Kab Labuhanbatu Utara	9. Kab Grobogan
10. Kab Langkat	10. Kab Jepara
11. Kab Mandailing Natal	11. Kab Karanganyar
12. Kab Nias	12. Kab Kebumen
13. Kab Nias Barat	13. Kab Kendal
14. Kab Nias Selatan	14. Kab Klaten
15. Kab Nias Utara	15. Kab Kudus
16. Kab Padang Lawas	16. Kab Magelang
17. Kab Padang Lawas Utara	17. Kab Pati
18. Kab Pakpak Bharat	18. Kab Pekalongan
19. Kab Samosir	19. Kab Pemalang
20. Kab Serdang Begadai	20. Kab Purbalingga
21. Kab Simalungun	21. Kab Purworejo
22. Kab Tapanuli Selatan	22. Kab Rembang
23. Kab Tapanuli Tengah	23. Kab Semarang
24. Kab Tapanuli Utara	24. Kab Sragen
25. Kab Toba Samosir	25. Kab Sukoharjo
26. Kota Binjai	26. Kab Tegal
27. Kota Gunung Sitoli	27. Kab Temanggung
28. Kota Medan	28. Kab Wonogiri
29. Kota Padangsidimpuan	29. Kab Wonosobo
30. Kota Pematangsiantar	30. Kota Magelang
	31. Kota Pekalongan
	32. Kota Salatiga
	33. Kota Semarang
	34. Kota Surakarta
	35. Kota Tegal

31. Kota Sibolga
32. Kota Tanjungbalai
33. Kota Tebing Tinggi

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahun 2016-2017. Dari kabupaten/kota yang terletak di Provinsi seperti dalam tabel 1, terdapat beberapa daerah yang tidak bisa diperoleh laporan keuangan yang telah diaudit sehingga jumlah yang menjadi sampel penelitian dalam penelitian ini, seperti yang terdapat dalam tabel 2.

Tabel 2
Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Jumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut)	33
Jumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng)	35
Data laporan keuangan yang tidak lengkap dan nilai belanja daerah kurang dari 1 pada tahun 2016-2017:	
Provinsi Sumatera Utara	(2)
Provinsi Jawa Tengah	(6)
Jumlah kabupaten/kota yang menjadi sampel di Provinsi Sumut	31
Jumlah kabupaten/kota yang menjadi sampel di Provinsi Jateng	29
Jumlah sampel penelitian 2 tahun (2016-2017) Provinsi Sumut	62
Jumlah sampel penelitian 2 tahun (2016-2017) Provinsi Jateng	58

Dari Tabel 2 maka diperoleh sampel penelitian di Provinsi Sumatera Utara terdapat 31 kabupaten/kota dan di Provinsi Jawa Tengah terdapat kabupaten/kota.

3.2. Pembahasan

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif dari belanja daerah dari 28 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016-2017 dan 26 kabupaten/kota yang terdapat di Jawa Tengah pada tahun 2016-2017 terdapat pada tabel 3 dan tabel 4.

Tabel 3
Statistik Deskriptif Belanja Daerah
Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2017

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Anggaran Belanja Operasional	62	320,983	4,413,	958,5	778,527,10
Kab/Kota di Sumut					
Anggaran Belanja Modal	62	134,891	1,411,	319,8	228,757,51
Kab/Kota di Sumut					
Anggaran Belanja Tak Terduga	62	,617,33	306,65	52,25	6,609
Kab/Kota di Sumut					
Anggaran Belanja Tak Terduga	62	200,000	24,494	3,499,	4,980,325,004
Kab/Kota di Sumut					
Anggaran Belanja Daerah	62	474,102	5,735,	1,281,	996,222,44
Kab/Kota di Sumut					
Realisasi Belanja Operasional	62	,783,01	922,59	855,3	9,948
Kab/Kota di Sumut					
Realisasi Belanja Modal	62	4	1,995	76,37	9
Kab/Kota di Sumut					
Realisasi Belanja Modal	62	288,399	3,584,	852,6	652,366,16
Kab/Kota di Sumut					
Realisasi Belanja Modal	62	,784,93	201,61	53,61	0,747
Kab/Kota di Sumut					
Realisasi Belanja Modal	62	6	7,241	1,173	
Kab/Kota di Sumut					
Realisasi Belanja Modal	62	122,786	997,47	272,9	170,019,41
Kab/Kota di Sumut					
Realisasi Belanja Modal	62	,141,23	5,991,	02,62	4,201
Kab/Kota di Sumut					
Realisasi Belanja Modal	62	7	902	8,853	
Kab/Kota di Sumut					
Realisasi Belanja Tak Terduga	62	0	12,195	1,177,	2,245,119,
Kab/Kota di Sumut					
Realisasi Belanja Tak Terduga	62	,281,7	096,3	187	
Kab/Kota di Sumut					
Realisasi Belanja Daerah	62	00	16		
Kab/Kota di Sumut					
Realisasi Belanja Daerah	62	426,980	4,523,	1,126,	809,155,35
Kab/Kota di Sumut					
Realisasi Belanja Daerah	62	,617,99	672,13	733,3	6,150
Kab/Kota di Sumut					
Realisasi Belanja Daerah	62	0	4,655	36,34	1
Kab/Kota di Sumut					

Tabel 3
Statistik Deskriptif Belanja Daerah
Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2017

Keterangan	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Devia tion
Anggaran Belanja Operasio nal Kab/Kota di Jateng	58	722,8 22,49 4,000	3,344, 110,24 7,945	1,582, 702,7 27,90 9	519,5 18,30 9,492
Anggaran Belanja Modal Kab/Kota di Jateng	58	194,9 18,67 4,732	1,412, 600,29 8,250	475,5 97,42 4,080	213,4 06,08 6,450
Anggaran Belanja Tak Terduga Kab/Kota di Jateng	58	500,0 00,00 0	142,52 2,536, 000	9,126, 389,0 59	25,13 5,842, 932
Anggaran Belanja Daerah Kab/Kota di Jateng	58	1,008, 226,4 88,00 0	4,758, 710,54 6,195	2,067, 426,5 41,04 7	690,7 28,10 7,255
Realisasi Belanja Operasio nal Kab/Kota di Jateng	58	631,5 00,04 6,278	3,052, 502,39 1,875	1,414, 787,1 72,25 0	469,3 99,82 5,200
Realisasi Belanja Modal Kab/Kota di Jateng	58	163,6 67,90 5,285	1,275, 359,08 8,966	413,3 27,30 0,760	195,5 48,27 4,738
Realisasi Belanja Tak Terduga Kab/Kota di Jateng	58	0	8,359, 950,22 8	1,111, 370,8 06	1,677, 590,6 46
Realisasi Belanja Daerah Kab/Kota di Jateng	58	849,4 74,26 2,275	4,327, 958,38 9,741	1,829, 225,8 43,81	634,1 14,52 8,160

Dari tabel 3 dan 4 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata anggaran belanja operasional, anggaran belanja modal, anggaran belanja tak terduga dan anggaran belanja daerah lebih tinggi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi, nilai rata-rata realisasi belanja operasional, nilai rata-rata realisasi belanja tak terduga dan nilai rata-rata realisasi belanja daerah lebih tinggi kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara, hanya nilai rata-rata realisasi belanja tak terduga yang lebih tinggi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Nilai maksimum anggaran belanja operasional di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara yaitu di Kota Medan tahun 2017 dengan jumlah belanja operasional sebesar Rp 4,413,092,921,342 yang mana jumlah tersebut lebih tinggi dari nilai maksimum pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang tahun 2017 sebesar Rp 3,344,110,247,945. Nilai maksimum anggaran belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara yaitu di Kota Medan dengan jumlah belanja modal Rp1,411,306,657,578 tahun 2017 dan jumlah tersebut sedikit lebih rendah daripada nilai maksimum jumlah anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang sebesar Rp1,412,600,298,250 tahun 2017. Nilai maksimum anggaran belanja tak terduga di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara yaitu di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2017 sebesar Rp 24,494,370,005 sedangkan nilai maksimum anggaran belanja tak terduga pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi yaitu di Kota Salatiga tahun 2016 sebesar Rp142,522,536,000. Nilai maksimum anggaran belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 5,735,922,591,995 di Kota Medan tahun 2017 lebih tinggi daripada nilai maksimum pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu di Kota Semarang tahun 2017 sebesar Rp 4,758,710,546,195.

Nilai minimum anggaran belanja operasional pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 320,983,936,388 di Kabupaten Pakpha Barat tahun 2017, nilai tersebut lebih rendah daripada nilai meimum anggaran belanja operasional pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp 722,822,494,000 di Kota Magelang tahun 2016. Nilai minimum anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 134,891,617,330 di Kota Sibolga tahun 2017, nilai tersebut juga lebih rendah daripada nilai minimum anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp 194,918,674,732 di Kabupaten Batang tahu 2017. Nilai minimum anggaran belanja tak terduga pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 200,000,000 di Kota Padangsidimpuan tahun 2016, nilai tersebut lebih rendah daripada nilai minimum anggaran belanja tak terduga pad kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp 500,000,000

di Kabupaten Temanggung tahun 2017. Nilai minimum anggaran belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp474,102,783,014 di Kabupaten Phakpha Barat tahun 2017 dan nilai minimum anggaran belanja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi yaitu sebesar Rp 1,008,226,488,000 di Kota Pekalongan tahun 2016.

Nilai maksimum realisasi belanja operasional di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara yaitu di Kota Medan tahun 2016 dengan jumlah belanja operasional sebesar Rp 3,584,201,617,241 yang mana jumlah tersebut lebih tinggi dari nilai maksimum pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang tahun 2017 sebesar Rp 3,052,502,391,875. Nilai maksimum realisasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara yaitu di Kota Medan dengan jumlah belanja modal Rp 997,475,991,902 tahun 2017 dan jumlah tersebut lebih rendah daripada nilai maksimum jumlah realisasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang sebesar Rp 1,275,359,088,966 tahun 2017. Nilai maksimum realisasi belanja tak terduga di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara yaitu di Kabupaten Simalungun tahun 2017 sebesar Rp 12,195,281,700 sedangkan nilai maksimum realisasi belanja tak terduga pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah lebih rendah yaitu di Kabupaten Pekalongan tahun 2017 sebesar Rp 8,359,950,228. Nilai maksimum realisasi belanja daerah pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 4,523,672,134,655 di Kota Medan tahun 2016 lebih tinggi daripada nilai maksimum pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu di Kota Semarang tahun 2017 sebesar Rp 4,327,958,389,741.

Tabel 3.4 dan tabel 5 berikut ini menunjukkan daya serap belanja daerah pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah.

Tabel 4
Statistik Deskriptif Daya Serap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2017

	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Devia tion
Daya Serap Belanja Operasional Kab/Kota di Sumut	62	0.812 17	0.947 59	0.900 3348	0.028 97512

Daya Serap Belanja Modal Kab/Kota di Sumut	62	0.641 76	0.969 25	0.871 0305	0.080 05514
Daya Serap Belanja Tak Terduga Kab/Kota di Sumut	62	0.000 00	0.999 57	0.349 9258	0.330 28261
Daya Serap Belanja Daerah Kab/Kota di Sumut	62	0.788 66	0.946 93	0.890 4373	0.034 68530
Valid N (listwise)	62				

Tabel 5
Statistik Deskriptif Daya Serap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2017

	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Devia tion
Daya Serap Belanja Operasional Kab/Kota di Jateng	58	0.809 46	0.950 72	0.893 6670	0.03845 620
Daya Serap Belanja Modal Kab/Kota di Jateng	58	0.632 20	0.986 12	0.864 4937	0.08008 088
Daya Serap Belanja Tak Terduga Kab/Kota di Jateng	58	0.000 00	0.994 28	0.273 0302	0.30534 408
Daya Serap Belanja Daerah Kab/Kota di Jateng	58	0.745 61	0.952 00	0.881 9550	0.04732 535
Valid N (listwise)	58				

Dari tabel 4 dan 5 disebutkan bahwa rata-rata daya serap belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja daerah lebih tinggi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan rata-rata daya serap Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Nilai maksimum untuk daya serap belanja operasional pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar 94,76% di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2016 sedangkan nilai maksimum daya serap belanja operasional pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi sebesar 95,07% di Kabupaten Rembang tahun 2016. Nilai maksimum untuk daya serap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar 96,93% di Kabupaten Batu Bara tahun 2016 sedangkan nilai maksimum daya serap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi sebesar 98,61% di Kabupaten Temanggung tahun 2017. Nilai maksimum untuk daya serap belanja tak terduga pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar 99,96% di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2017 sedangkan nilai maksimum daya serap belanaa tak terduga pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah lebih rendah sebesar 99,43% di Kabupaten Wonogiri tahun 2017. Nilai maksimum untuk daya serap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar 94,69% di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016 sedangkan nilai maksimum daya serap belanja operasional pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi sebesar 95,20% di Kabupaten Temanggung tahun 2017.

Nilai minimum untuk daya serap belanja operasional pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar 81,22% di Kota Medan tahun 2016 sedangkan nilai minimum daya serap belanja operasional pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah lebih rendah sebesar 80,95% di Kota Surakarta tahun 2016. Nilai minimum untuk daya serap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar 64,18 % di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2016 sedangkan nilai minimum daya serap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah lebih rendah sebesar 63,22% di Kabupaten Sukoharjo tahun 2017. Nilai minimum untuk daya serap belanja tak terduga pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0% yang berarti anggaran belanja tak terduga tidak terealisasikan dan terdapat di beberapa kabupaten/kota baik di tahun 2016 maupun di tahun 2017 sedangkan nilai minimum daya serap belanja tak terduga pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah juga sebesar 0% dan terdapat di beberapa kabupaten/kota di tahun 2016 dan 2017. Nilai minimum untuk daya serap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar 78,87% di Kota Medan tahun 2016 sedangkan nilai minimum daya serap belanja daerah pada

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah lebih rendah sebesar 74,56% di Kota Salatiga tahun 2016.

Dari tabel statistik deskriptif di atas terdapat daerah yang memiliki anggaran paling tinggi tetapi memiliki daya serap yang paling rendah.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap tiga dipotesis menggunakan spss dengan menggunakan uji non parametrik Mann Whitney dengan jumlah sampel yang tidak berpasangan. Hasil dari uji hipotesis terdapat dalam tabel 6, tabel 7 dan tabel 8 berikut ini.

Tabel 6
Hasil Uji Mann Whitney Anggaran

	Anggaran Belanja Operasional	Anggaran Belanja Modal	Anggaran Belanja Tak Terduga	Anggaran Belanja Daerah
Mann-Whitney U	507.000	610.000	1257.500	498.000
Wilcoxon W	2460.000	2563.000	3210.500	2451.000
Z	-6.780	-6.239	-2.842	-6.827
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.000	.004	.000

a. Grouping Variable: Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji non parametrik Mann Whitney di dapatkan hasil nilai t sebesar 0,000 untuk anggaran belanja operasional, nilai t sebesar 0,000 untuk anggaran belanja modal, nilai t sebesar 0,004 untuk anggaran belanja tak terduga dan nilai t sebesar 0,000 untuk anggaran belanja daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwanilai t untuk keempat anggaran belanja tersebut kurang dari 0,05 sehingga hipotesis 1 yaitu terdapat perbedaan anggaran belanja di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Jawa Tengah diterima.

Tabel 7
Hasil Uji Mann Whitney Realisasi
Kabupaten/Kota

	Realisasi Belanja Operasional	Realisasi Belanja Modal	Realisasi Belanja Tak Terduga	Realisasi Belanja Daerah
Mann-Whitney U	529.000	689.000	1735.000	531.000
Wilcoxon W	2482.000	2642.000	3688.000	2484.000
Z	-6.664	-5.824	-.333	-6.654
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.000	.739	.000

a. Grouping Variable: Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji non parametrik Mann Whitney di dapatkan hasil nilai t sebesar 0,000 untuk realisasi belanja operasional, nilai t sebesar 0,000 untuk realisasi belanja modal, nilai t sebesar 0,739 untuk realisasi belanja tak terduga dan nilai t sebesar 0,000 untuk anggaran belanja daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwanilai t untuk ketiga realisasi belanja tersebut kurang dari 0,05 sedangkan untuk realisasi untuk belanja tak terduga lebih dari 0,05 sehingga hipotesis 2 yaitu terdapat perbedaan realisasi belanja di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Jawa Tengah diterima untuk realisasi belanja operasional, realisasi belanja modal dan realisasi belanja daerah sedangkan untuk realisasi belanja tak terduga ditolak.

Tabel 8
Hasil Uji Mann Whitney Daya Serap

	Daya Serap Belanja Operasional	Daya Serap Belanja Modal	Daya Serap Belanja Tak Terduga	Daya Serap Belanja Daerah
Mann-Whitney U	1670.000	1687.000	1595.000	1695.000
Wilcoxon W	3381.000	3398.000	3306.000	3406.000
Z	-.672	-.583	-1.072	-.541
Asymp. Sig. (2-tailed)	.501	.560	.284	.589

a. Grouping Variable: Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji non parametrik Mann Whitney di dapatkan hasil nilai t sebesar 0,501 untuk daya serap

belanja operasional, nilai t sebesar 0,560 untuk anggaran belanja modal, nilai t sebesar 0,284 untuk anggaran belanja tak terduga dan nilai t sebesar 0,589 untuk anggaran belanja daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwanilai t untuk keempat daya serap belanja tersebut lebih dari 0,05 sehingga hipotesis 3 yaitu terdapat perbedaan daya serap belanja di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Jawa Tengah ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan daya serap belanja di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Jawa Tengah.

Dari hasil uji hipotesis tersebut maka Kabupaten/Kota memiliki perbedaan dalam anggaran maupun realisasinya akan tetapi dalam hal daya serap pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah maupun Sumatera Utara tidak terdapat perbedaan. Daya serap yang rendah baik terdapat pada daya serap belanja tak terduga baik di Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah maupun Sumatera Utara yang mana daya serapnya tidak mencapai angka 50%.

4. KESIMPULAN

Penelitian memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan anggaran belanja operasional, anggaran belanja modal, anggaran belanja tak terduga, dan anggaran belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2017
2. Terdapat perbedaan realisasi belanja operasional, realisasi belanja modal, dan realisasi belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2017. Akan tetapi untuk realisasi belanja tak terduga tidak terdapat perbedaan pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2017
3. Tidak terdapat perbedaan daya serap belanja operasional, daya serap belanja modal, daya serap belanja tak terduga, dan daya serap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2017

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya hendaknya bisa meneliti dengan membanding anggaran, realisasi dan daya serap di Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur.
2. Penelitian selanjutnya bisa meneliti dengan jumlah tahun yang lebih Panjang.

3. Penelitian selanjutnya bisa memasukkan variable dummy kebijakan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah.

5. REFERENSI

Anfujatin. 2016. "Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban." *Jurnal Administasi Publik* 14(1):1-18.

BPKP. 2011. "Menyoal Penyerapan Anggaran." P. 5 in *Paris Review Edisi 6*.

Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.

Juliani, Dian, and Mahfud Sholihin. 2014. "Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 11(2):177-99. doi: 10.21002/jaki.2014.10.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Megawati, Liya. 2017. "Analysis Factors Affecting Dominant Budget Absorption (Study at Department of Revenue, Finance and Asset Management Karawang District)." *Value Journal Of Management And Business* 2(1):175-88.

Rambe, Fadlina Almi M. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara."

Ruhmaini, Ruhmaini, Syukriy Abdullah, and Darwanis Darwanis. 2019. "Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4(1):31-43. doi: 10.24815/jped.v4i1.10912.

Siswanto et al. 2011. "Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010." *Policy Paper Kementerian Keuangan* 1-12.